

## DAMPAK BLOKADE AKSES KE TPST PIYUNGAN

# Ratusan Ton Sampah Terbengkalai

**PIYUNGAN (KR)** - Kemelut di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan seolah tidak kunjung usai. Sejak Jumat (18/12) hingga Minggu (20/12), warga melarang armada sampah melakukan bongkar sampah.

Aksi itu sebagai buntut kekecewaan warga terhadap pemerintah lantaran sejumlah aspirasi mereka hingga kini tidak digubris. Akibatnya ratusan ton sampah di masyarakat tidak bisa diambil oleh jasa sampah lantaran tidak bisa membuang.

"Jumlah armada anggota kami mencapai 150 unit, jika satu armada dalam sehari mengambil satu ton sampah, angkanya sudah kelihatan. Padahal sejak Jumat lalu sudah tidak bisa membuang ke TPST," ujar Ketua Paguyuban Jasa Sampah 'Eker-Eker Golek Menir', Sodik Marwanto, Minggu (20/12).

Dampak penutupan TPST, sampah di masyarakat sudah tidak diambil sejak Jumat. Kalau diambil juga bingung mau dibuang kemana. "Jelas saya dan temen-temen mendapat keluhan dari pelanggan. Kami bisanya memberikan penjelasan karena TPST memang ditutup," ujar Sodik.

Sebenarnya pihaknya lelah menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Kenyataannya keluhan yang disampaikan sejak beberapa tahun lalu, mulai jalan hingga lampu penerangan, hingga kini belum sepenuhnya direspons. Lokasi pembuangan dengan sampai masuk sebenarnya tidak seimbang. Sehingga umur TPST Piyungan ini tinggal menunggu waktu saja.

Pantauan KR, Minggu (20/12), sejumlah teknisi memperbaiki alat berat. Sementara alat berat lainnya mendorong sampah ke tengah agar landasan dermaga bisa digunakan armada melakukan bongkar.

Koordinator Pemulung TPST Piyungan yang tergabung dalam wadah Mardiko, Maryono, mengatakan sejak musim penghujan antrian armada pengangkut sampah bisa mencapai 1 kilo meter untuk bisa bongkar sampah. Berulang kali warga 'berteriak' agar dibuat akses jalan ke tengah



KR-Sukro Riyadi

Alat berat menyingkirkan tumpukan sampah di TPST Piyungan, Minggu (20/12).

area TPST Piyungan. Sehingga armada bisa masuk ke tengah dan tidak mengganggu jalan masyarakat.

Tapi sampai hari ini bongkar muat sampah dilakukan di tepi jalan, padahal akses tersebut sebenarnya menjadi satu dengan jalan masyarakat. "Misalnya jalan tersebut khusus untuk armada sampah, kami tidak

mempermasalahkannya. Karena jalan tersebut juga menjadi akses warga sekitar TPST itu dasar kami keberatan," ujar Maryono.

Sebelumnya warga juga minta agar jalan diperbaiki, penerangan jalan ditambah. Namun seolah-olah keluhan warga sekitar TPST belum direspons optimal. "Kalau bongkar sampah belum bisa masuk ke te-

ngah area TPST kami tetap melarang armada masuk TPST," jelas Maryono.

Dijelaskan, warga tidak bermaksud menghalang-halangi armada pengangkut sampah melakukan bongkar muat. Tapi keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di TPST harus ditunjukkan.

Terpisah anggota Komisi C DPRD DIY, H Amir Syarifudin, mengatakan gejala di tengah masyarakat saat ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. "Jadi reaksi warga sekarang ini sebenarnya sebuah akumulasi kekecewaan yang lama dipendam. Masyarakat sebenarnya sudah sabar menghadapi situasi di sekitar TPST Piyungan, tapi kesabaran itu kan ada batasnya," tuturnya.

Seharusnya lokasi untuk bongkar sampah 2 dermaga, sekarang ini hanya satu sehingga ketika musim hujan seperti ini bongkar muat pasti mengalami hambatan. "Mari bersama-sama, dinas terkait mencari solusi, lihat lokasi agar persoalan di TPST terselesaikan kalau seperti ini masyarakat sangat dirugikan dan semua kena dampaknya," jelas Amir. (Roy)-f

## BSPN Serahkan Laporan kepada AHM-JP



KR-Sukro Riyadi

**Kepala BSPN DPC PDIP Bantul, Adip Setiyono ST, menyerahkan laporan kepada Abdul Halim Muslih.**

**BANTUL (KR)** - Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP yang diberi amanah menjadi saksi duet Abdul Halim Muslih-Joko (AHM-JP) dalam Pilkada Bantul selesai menjalankan tugasnya. Tim bekerja mulai dari tahap rekapitulasi hingga pleno penetapan. Kemudian hasilnya sudah dilaporkan secara tertulis dan

diberikan kepada AHM-JP. Kepala BSPN DPC PDIP Bantul, Adip Setiyono ST, Minggu (20/12), mengatakan dalam melaksanakan hitung cepat BSPN Cabang Bantul menerjunkan saksi TPS sebanyak 4.170 orang. Mulai koordinator desa 150 orang, koordinator kecamatan atau saksi PPK sebanyak 34 orang. "Dari perhitungan rekapitulasi di Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Bantul, hitung cepat BSPN DPC PDIP Perjuangan Bantul margin error 0,04 %," ujar Adip.

Dijelaskan, sejak hari H semua saksi bekerja ekstra keras. Mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, Korde, Korcam dan pengurus BSPN. "Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada paslon AHM-JP, Tim Pemenangan, DPC PDIP yang telah menugaskan BSPN Cabang Bantul secara terstruktur, terukur dan terencana dengan baik," ujar Adip.

Merujuk data KPU Bantul, Paslon nomor urut 1 AHM-JP meraup 305.653 suara, Paslon nomor urut 2 Drs H Suharsono-Totok Sudarto (NoTo) mendapat 228.408 suara. Sehingga AHM-JP unggul sebanyak 77.156 suara. (Roy)-f



## KOMISI A DPRD BANTUL

# Selesaikan Perda dan Program Strategis

**BANTUL (KR)** - Komisi A DPRD Kabupaten Bantul telah berhasil menyelesaikan beberapa Peraturan Daerah (Perda) serta program penting dan strategis bagi pembangunan Kabupaten Bantul.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Salim, kepada KR, Minggu (20/12), menuturkan banyak program kerja dari Komisi A yang telah terlaksana di 2020 ini. Beberapa program strategis dan vital yang telah berhasil dilaksanakan Komisi A di antaranya bersama mitra kerja Komisi A khususnya

Satpol PP, Komisi A ikut *ambuyur* dalam program Penanganan Pandemi Covid-19 di antaranya Sosialisasi Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 dan monitoring penegakan pelaksanaan aturan.

Selain itu Komisi A bersama mitra kerja juga telah berhasil membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan APBD Perubahan tahun lalu. Adapun pembahasan dan penetapan APBD ini telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh mitra kerja serta telah terserap secara optimal dan tepat sasaran.

"Kami Komisi A bersama dengan mitra kerja komisi juga telah membahas beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang tergolong vital di Kabupaten Bantul. Salah satunya Perda tentang Pamong Kelurahan dan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa," tegas Agus Salim.

Diungkapkan, Perda tentang Pamong Kelurahan dan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa merupakan perda strategis dan vital dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga mendesak dilakukan percepatan dan upaya penyegeraan penyelesaian Perda supaya segera dapat dipergunakan di masyarakat. Agus Salim menambahkan aturan dan payung hukum terkait pamong dan pemimpin desa memang seharusnya harus diprioritaskan.



KR-Rahajeng Pramesi

Agus Salim.

Hal ini karena pamong dan pemimpin desa yang bertugas melaksanakan dan melayani kebutuhan masyarakat harus memiliki payung hukum yang jelas. Program-program yang telah dilaksanakan seperti peninjauan dan monitoring lapangan di seluruh kelurahan dan kecamatan di Bantul terus dilaksanakan Komisi A sebagai bentuk kepedulian dan monitoring pegawai.

Terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020, Komisi A mengapresiasi kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

tetap konsisten memegang teguh netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

"Sejak jauh-jauh hari Komisi A DPRD Bantul memang mewanti-wanti kepada seluruh ASN di Bantul untuk tetap menjaga dan memegang teguh netralitas. Kami sangat apresiasi netralitas ASN selama Pilkada terjaga," tegasnya.

Agus Salim kemudian mengimbau ASN untuk tetap netral dan berkarya melayani masyarakat siapapun Bupatinya.

Ditambahkan, kualitas ASN yang baik salah satunya terlihat dari netralitas mereka dalam menghadapi Pilkada kemarin. Dari Komisi A, imbuhnya, mengapresiasi hadirnya ASN Bantul yang berkualitas. ASN berkualitas mampu mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta menyempurnakan tugas pokok fungsi (Tupoksi) ASN sebagai pelayan masyarakat.

"Kami Komisi A berharap Bantul mampu mewujudkan Good Governance, revolusi mental dan reformasi birokrasi yang positif serta utamanya Pekerjaan Rumah (PR) terberat di Bantul mengurangi angka kemiskinan. Kami juga berharap penerapan birokrasi kedepan lebih menekankan terkait pelayanan, di mana layanan itu dilakukan berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dan sarana pendukungnya," urainya. (Aje)-f

## UAA-BKKBN Komitmen Berjuang Atasi Stunting



KR-Rahajeng Pramesi

**Nota kerja sama BKKBN dan Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta.**

**BANTUL (KR)** - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Universitas Alma Ata (UAA) untuk berjuang bersama melaksanakan program pemerintah. Salah satu hal program yang komitmen bersinergi bersama yakni mewujudkan Indonesia Sehat dengan meminimalisir dan mencegah kasus stunting (kekerdilan).

Dr H Hamam Hadi MS ScD SpGK kepada KR usai pelaksanaan penandatanganan MoU kerja sama

antara UAA-BKKBN tentang 'Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga Berencana', Minggu (20/12), menuturkan banyak hal dan rencana yang akan dikerjakannya dengan BKKBN. Selain stunting beberapa hal seperti usaha meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi ibu, terkait gizi anak dan sebagainya.

"UAA sudah lama komit-

men melakukan advokasi kaitan stunting utamanya di kawasan Jawa Tengah. Bahkan kami menjadi konsultan di 11 area di Jateng antara lain Brebes, Cilacap, Kebumen dengan fokus pengurangan angka stunting," tegas Rektor UAA.

Prof Hamam berharap kerja sama yang dirintis dengan BKKBN mampu menjadi solusi menciptakan Indonesia sehat bebas Stunting.

Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo SpOg (K) menegaskan BKKBN memilih UAA untuk bekerja sama karena UAA memiliki Profesor ahli gizi yang juga seorang ulama. Sehingga kerja sama dianggap relevan kaitan kinerja BKKBN dalam mewujudkan program kerja utamanya permasalahan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak utamanya kaitan gizi, stunting bahkan kesehatan reproduksi. (Aje)-f

## PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN

# Akhir Desember 2020, Selesai

**BANTUL (KR)** - Masa berlakunya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau Samsat Bantul yang telah dimulai sejak April 2020 dan mengalami tiga kali perpanjangan akan diakhiri 31 Desember 2020.

Sesuai data di Kantor Samsat Bantul, nilai penghapusan denda sampai akhir November 2020 sebesar Rp 11,608 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari denda pajak PKB dengan jumlah kendaraan bermotor roda dua maupun mobil sebanyak 84.012 unit, nilai penghapusan denda Rp 11.362.594.500. Denda pajak BBN sebanyak 3.702 unit kendaraan senilai Rp 246.356.900. Sehingga total penghapusan denda pajak sebanyak 87.714 unit kendaraan senilai Rp 11.608.951.400.

Dijelaskan oleh Kepala Samsat Bantul, Pramono SH MH, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor roda dua maupun mobil dengan tak terbatas masa absen membayar pajak. "Jadi misalnya tidak membayar pajak selama 20 tahun, pemiliknya hanya membayar pajak pokok selama 6 tahun, sedangkan dendanya selama 20 tahun dihapus," jelas Pramono. (Jdm)-f



## Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis & Ekonomika Tahun Akademik 2020/2021

### DOKTOR ILMU EKONOMI

Akreditasi A

- Konsentrasi Ilmu Ekonomi Ekonomi dan Keuangan Islam, Kebijakan Publik
- Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan, Pemasaran
- Konsentrasi Akuntansi Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi, Akuntansi Sektor Publik, Auditing

### MAGISTER MANAJEMEN

Akreditasi A

- Pilihan Konsentrasi: Manajemen Strategik, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan Islam

### MAGISTER ILMU EKONOMI

Akreditasi A

- Pilihan Konsentrasi: Ekonomi dan Keuangan Islam, Kebijakan Publik

### MAGISTER AKUNTANSI

Akreditasi A

- Terdapat Program Dual Degree dengan University of Western Australia
- Pilihan Konsentrasi: Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Syariah, Audit Forensik, Perpajakan

lpdp Semua program magister telah menjadi prodi tujuan Beasiswa LPDP

Gelombang 1: 12 Oktober 2020 - 30 November 2020

Gelombang 2: 1 Desember 2020 - 9 Januari 2021

### ALUR PENDAFTARAN

- Daftar NIU (admi.uii.ac.id)
- Login dengan user NIU & Password yang telah didaftarkan (admi.uii.ac.id)
- Bayarkan tagihan uang pendaftaran (pmb.uii.ac.id)
- Cetak kartu ujian (admi.uii.ac.id)
- Hubungi admin pascasarjana untuk pelaksanaan ujian seleksi (nomor tertera di bawah)